



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5871-5884

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Orientasi dan Budaya Politik antara Etnis Sunda dengan Etnis Makassar

Ubaidah Abdurrahman Syamsari^{1✉}, Faisal², Marchyananda Winata³, Anisa Nur Afifah⁴,
Habibah Assa'addah⁵, Hana Indriana⁶, Rizki Aditya Putra⁷

(1) Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

(2) Fisika, Institut Pertanian Bogor

Email: hanaindriana@apps.ipb.ac.id^{1✉}

Abstrak

Termasuk dalam etnis terbesar di Indonesia, Sunda dan Makassar memiliki orientasi dan budaya politiknya masing-masing. Perbedaan ini berdampak pada perilaku politik dan dinamika politik lokal dan nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan dan relevansi dari perbedaan orientasi dan budaya politik antara Etnis Sunda dan Etnis Makassar terhadap perilaku kedua etnis dalam berpolitik. Metode yang digunakan adalah metode etnografi dan netnografi dengan kualitatif deskriptif sebagai metode analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam pandangan politik, partisipasi politik, dan preferensi pemilihan pemimpin antara Etnis Sunda dan Etnis Makassar. Perbedaan dalam orientasi politik dan budaya politik memiliki dampak terhadap proses pengambilan keputusan politik, serta stabilitas politik di tingkat lokal dan nasional.

Kata Kunci: *Budaya, Makassar, Orientasi, Sunda*

Abstract

Included among the largest ethnic groups in Indonesia, Sundanese and Makassarese have their own orientations and political cultures. These differences have an impact on the political behavior and dynamics at both the local and national levels. This study aims to analyze the comparison and relevance of the differences in political orientation and culture between the Sundanese and Makassarese ethnic groups towards the political behavior of both groups. The method used is ethnographic and netnographic methods, with qualitative descriptive analysis as the analytical method. The results of this research show that there are significant differences in political views, political participation, and leadership preferences between the Sundanese and Makassarese ethnic groups. The differences in political orientation and political culture have an impact on the political decision-making process, as well as the political stability at the local and national levels.

Keyword: *Culture, Makassar, Orientation, Sunda*

PENDAHULUAN

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki banyak kekayaan bahasa, budaya, agama, dan etnis. Indonesia tercatat memiliki lebih dari 1301 kategori suku yang hidup berdampingan dalam perbedaan multikultural yang ada (BPS, 2010). Multikulturalisme etnis sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu dari tiga model multikultural sebagai alternatif solusi persatuan bangsa (Agustianty, 2021). Keragaman etnis di Indonesia yang sering kali dianggap sebagai hambatan demokrasi haruslah dipandang sebagai kelebihan dengan nilai kearifan lokalnya dapat membawa demokrasi ke arah yang lebih baik (Adiwilaga, 2017). Termasuk dalam etnis terbesar di Indonesia, Etnis Sunda dan Etnis Makassar memiliki kekayaan tradisi, budaya, dan juga kebijakan, orientasi dan budaya politiknya masing-masing. Faktor-faktor seperti nilai budaya, norma sosial, dan dinamika politik lokal berperan penting dalam membentuk pola perilaku politik yang khas pada Etnis Sunda dan Makassar.

Budaya Politik adalah acuan pada perilaku dan sikap warga negara dalam merespons struktur dan kegiatan politik di suatu daerah (Umsu, 2023). Dalam konteks budaya politik Sunda dan Makassar, terdapat persamaan menarik antara Etnis Sunda dan Etnis Makassar dalam preferensi pemilihan pemimpin. Etnis Sunda, yang terkenal dengan sifat optimistik, ramah, dan sopan (Haddad, 2017). Selain itu, cenderung memilih pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai ideal kepemimpinan Sunda seperti kecerdasan, keramahan, dan kesopanan (Herdiansah dan Al-Banjari, 2023). Di sisi lain, Etnis Makassar menunjukkan fokus pada nilai-nilai etnis mereka sendiri dan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Budaya politik Etnis Makassar didasarkan pada nilai-nilai seperti rasa malu (*siri'*) dan semangat etnisitas, sehingga menjadikan budaya *siri* sebagai sistem nilai dalam berpolitik (Sjaf, 2017).

Copyright @ Ubaidah Abdurrahman Syamsari, Faisal, Marchyananda Winata, Anisa Nur Afifah,

Habibah Assa'addah, Hana Indriana, Rizki Aditya Putra

Orientasi politik merujuk pada pandangan, sikap, dan orientasi individu terhadap politik, termasuk pengetahuan, nilai, dan perilaku politik terhadap partai politik, ideologi politik, dan sistem politik yang ada, serta sikapnya terhadap perannya sendiri dalam sistem politik (Anwar, 2015). Terdapat perbedaan dalam orientasi politik kedua etnis tersebut. Orientasi politik sendiri menjadi penting karena salah satu perilaku politik dalam mempengaruhi keputusan seseorang memilih atau tidaknya seorang pemimpin (Yunita, 2014). Etnis Sunda cenderung menunjukkan orientasi yang lebih damai dan kurang minat terhadap politik yang dianggap kotor atau hanya mengincar kekuasaan tanpa memperhatikan kelayakan. Di sisi lain, Etnis Makassar cenderung menunjukkan karakter suka merantau, dengan tradisi *sompe'* atau merantau yang melekat dalam budaya mereka (Kompas, 2015). Selain itu, nilai-nilai tradisi yang menghormati garis keturunan juga memengaruhi orientasi politik Etnis Makassar (Lapungge, 2023).

Perbedaan antara orientasi dan budaya politik antara etnis Sunda dan Makassar inilah yang dapat kita lihat dalam penelitian ini yang di dalamnya akan memberikan gambaran menarik jika diteliti lebih lanjut. Gambaran akan memberikan penjelasan tentang dampak dari budaya orientasi politik masing-masing etnis, serta relevansi dan implikasinya terhadap politik nasional. Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisis perbandingan antara orientasi dan budaya politik Etnis Sunda dan Etnis Makassar; (b) mengidentifikasi dampak orientasi dan budaya politik masyarakat Sunda dan Makassar dalam mengambil keputusan politik; c) menganalisis relevansi dari perbedaan orientasi dan politik budaya etnis Sunda dan Makassar bagi stabilitas politik dan pembangunan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode etnografi dan netnografi dengan pendekatan kualitatif untuk dapat mengidentifikasi kedalaman fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan metode etnografi dan netnografi. Subjek penelitian yang akan kami gunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian. Kriteria responden dalam penelitian ini: 1. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan; 2. Berasal dari etnis Sunda atau Makassar; 3. Berusia 17-40 tahun; 4. Pernah berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin daerah. Ada pun variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu etnis (Sunda dan Makassar) sebagai variabel independen. Kemudian orientasi politik yang mencakup: a) orientasi kognitif, b) orientasi afektif, c) orientasi evaluatif, dan budaya politik yang mencakup: a) partisipasi politik sebagai variabel dependen. Informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik etnografi melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan observasi terstruktur

melalui kajian netnografi di media sosial X yang kemudian kami analisis secara komparatif untuk membandingkan orientasi politik dan budaya politik antara etnis Sunda dan Makassar, melibatkan uji perbedaan antara dua kelompok menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman dengan tiga tahapan: a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan antara Orientasi dan Budaya Politik Etnis Sunda dan Etnis Makassar

a. Orientasi Politik

Pandangan politik atau sudut pandang politik berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Sudut pandang politik masyarakat dapat berasal dari internal masyarakat itu sendiri atau dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Sudut pandang politik merupakan keputusan yang mempengaruhi perilaku politik seseorang dan berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih. Tentu saja, pilihan politik seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh pandangan politiknya.

Interaksi individu dengan lingkungannya memiliki dampak pada orientasi individu tersebut. Orientasi politik terdiri dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif, seperti yang dijelaskan oleh Almond dan Verba, dapat tercermin dan diamati dari perilaku masyarakat dalam aktivitas politik mereka. Tindakan politik yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan politik (Mansyur 2020). Semakin banyak pengalaman dan interaksi yang dialami oleh individu, semakin banyak pertimbangan yang dimiliki individu tersebut dalam membuat keputusan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pemahaman individu yang didukung oleh perbandingan-perbandingan yang luas. Faktor internal dan eksternal turut mendorong proses ini. Semakin banyak informasi yang diperoleh individu, semakin baik pula pertimbangan yang akan dilakukannya.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi politik antara etnis Sunda dan etnis Makassar berbeda. Etnis Sunda pada dasarnya tidak memilih pemimpin berdasarkan latar belakang ras pemimpin tersebut, melainkan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dan program yang ditawarkan yang bisa dilihat dari adanya kampanye yang dilakukan jelang pemilu. Hal tersebut dikarenakan etnis Sunda memilih untuk bersikap damai dan tidak terlalu terlibat dalam konflik politik karena tidak suka keributan, berbanding terbalik dengan etnis Makassar yang memilih pemimpin berdasarkan latar belakang ras pemimpin. Mereka memiliki semangat politik yang ditunjukkan dalam keinginan mereka untuk berdialog mengenai politik. Hal ini

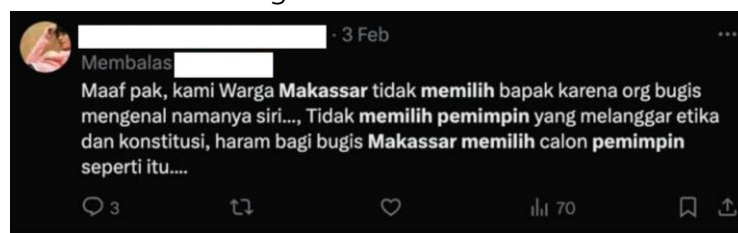
berkesesuaian dengan budaya Makassar yaitu tudang sipulung atau tudang assipettangngareng, yang artinya secara makna “duduk saling bertatap muka” atau “duduk bersama” , tetapi secara konseptual merupakan ruang publik bagi rakyat untuk menyuarakan haknya (Faisal, 2020).

Berdasarkan hasil etnografi yang telah kami peroleh, ditemukan pada etnis sunda bahwa kesamaan latar belakang etnis tidak berpengaruh pada pemilihan pemimpin, Hal ini menunjukkan perbedaan dari penelitian Herdiansah dan Albanjari (2023) bahwa persamaan etnis berpengaruh terhadap pemilihan pemimpin. Sedangkan pada suku Makassar latar belakang ras berpengaruh terhadap pemilihan pemimpin. Nilai-nilai tradisi masyarakat Makassar yang menghormati garis keturunan menjadi penentu dalam memilih pemimpin.

Temuan ini didukung oleh penelitian berdasarkan hasil netnografi, pada platform media sosial X, dimana warga Makassar menyatakan memilih pemimpin berdasarkan nilai yang mereka yakini yaitu adalah rasa malu (siri'). Dalam konteks pemilihan presiden, @Almuiz_Zona dalam *tweetnya* menyebutkan bahwa warga makassar tidak memilih prabowo karena orang bugis mengenal siri', dimana prabowo tidak mencerminkan sifat tersebut ketika pemilihan presiden. Temuan ini konsisten dengan pernyataan Sjaf (2023), bahwa nilai siri telah menjadi faktor utama dalam memilih pemimpin. Selain itu, sebuah *tweet* dari platform X dimana mencantumkan beberapa nilai kepemimpinan berdasarkan budaya Makassar yaitu Lontara Makassar. Nilai-nilai ini menjadi kriteria ideal masyarakat Makassar dalam memilih pemimpin.



Gambar 1. Netnografi Preferensi Pemilih Makassar



Gambar 2. Netnografi Preferensi Pemilih Makassar

Pada aspek kognitif, mayoritas partisipan yang berasal dari etnis Sunda menekankan bahwa dalam proses pemilihan pemimpin, faktor yang paling penting bagi mereka adalah reputasi, visi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon pemimpin. Mereka lebih

menitikberatkan pada substansi dari visi dan rencana kerja yang diajukan dalam memilih pemimpin. Di sisi lain, etnis Makassar lebih mempertimbangkan pengalaman, afiliasi partai politik, reputasi pemimpin, dan kemampuan pemimpin dalam menghadapi tantangan kemajuan negara sebagai faktor utama dalam pemilihan pemimpin. Salah satu informan dari mahasiswa berasal dari Makassar, ketua divisi kajian dan aksi strategis FEM IPB, menyatakan "Saat memilih seorang pemimpin, saya mempertimbangkan rekam jejak mereka, latar belakang partai politik yang mereka dukung, perilaku yang menunjukkan harga diri, serta kemampuan mereka untuk memperlakukan manusia dengan baik tanpa membuat janji-janji kosong yang banyak. Selain itu, rasa malu dan sikap yang tidak sombong, rendah hati, dan bijaksana juga menjadi faktor penting dalam menilai integritas dan kepemimpinan seseorang".

Mereka menilai bagaimana calon pemimpin telah menghadapi tantangan sebelumnya dan bagaimana pemimpin tersebut dapat mengatasi tantangan di masa depan sebagai hal yang krusial dalam proses pemilihan. Peran kampanye juga dilihat berbeda oleh kedua etnis ini, di mana etnis Sunda cenderung melihat kampanye sebagai sarana penyampaian visi dan program kerja, sementara etnis Makassar lebih memperhatikan aspek lain seperti pengalaman dan rekam jejak pemimpin dalam kampanye.

Pada aspek afektif, mayoritas responden dari etnis Sunda menunjukkan bahwa faktor emosional tidak begitu berpengaruh dalam pemilihan pemimpin. Mereka cenderung memilih dengan lebih objektif, mempertimbangkan fakta dan analisis secara rasional. Ketika menghadapi konflik politik, mayoritas dari mereka memilih untuk menjaga damai dan menghindari konfrontasi terbuka. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan wawancara berasal dari Sunda yang menyatakan "Saya lebih memilih untuk bersikap damai dan tidak terlalu terlibat dalam konflik politik karena tidak suka keributan".

Di sisi lain, etnis Makassar menunjukkan bahwa hubungan emosional cukup mempengaruhi pemilihan pemimpin. Sekitar setengah dari responden etnis Makassar mengakui adanya keterlibatan emosional dalam memilih pemimpin. Mereka juga lebih cenderung melibatkan perasaan dan emosi dalam proses pemilihan, bahkan dalam menghadapi analisis objektif dan fakta. Kedua etnis ini cenderung memilih untuk berdialog terbuka dalam mengatasi ketidaksepakatan politik. Namun, terdapat perbedaan di mana sebagian responden etnis Sunda lebih memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam konflik politik, sementara etnis Makassar memiliki semangat yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam dialog politik untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini menggambarkan perbedaan dalam orientasi politik antara kedua etnis tersebut.

Pada aspek evaluatif, mayoritas responden dari etnis Sunda menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem politik di Indonesia, sementara sebagian kecil lainnya menyatakan netralitas terhadap sistem tersebut. Di sisi lain, mayoritas responden dari etnis Makassar menunjukkan sikap netral terhadap sistem politik saat ini, meskipun ada yang mengungkapkan ketidakpuasan dan kepuasan terhadap sistem yang ada. Terkait dengan kinerja pemimpin yang berkuasa, responden dari etnis Makassar cenderung lebih puas daripada responden dari etnis Sunda, dengan penilaian yang menunjukkan perlunya melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kinerja lembaga penyelenggara yang mengawal pemilu juga ditemukan pada responden dari etnis Makassar. Sesuai dengan pernyataan salah satu informan etnis Makassar, menyatakan "Saya kurang puas dengan lembaga pemilu dimana meloloskan prabowo-gibran dalam pemilu presiden". Hal ini menggambarkan adanya perbedaan sikap evaluatif antara kedua etnis tersebut terhadap politik dan pemerintahan di Indonesia.

b. Budaya Politik

Budaya politik merujuk pada nilai-nilai yang dianut secara bersama-sama oleh suatu masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijakan publik yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Dalam arti yang lebih sederhana, budaya politik mencakup nilai-nilai yang berkembang dan diterapkan oleh suatu masyarakat dalam konteks politik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik juga dipengaruhi oleh budaya politik yang ada (Sumartono, 2018). Berkembangnya budaya politik di suatu daerah dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat (Hiranatasya, 2024). Menurut Almond dan Verba, budaya politik dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, kaula, dan partisipan. Budaya politik parokial terjadi ketika partisipasi politik rendah dan berpusat pada daerah, sederhana, dan tradisional. Budaya politik kaula ditunjukkan oleh minat dan kesadaran terhadap sistem politik secara menyeluruh, namun tanpa aktif memberikan masukan terhadap sistem politik. Sementara budaya politik partisipan, di mana masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan ingin berperan aktif dalam proses politik, merasa memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan politik, bukan hanya menerima keputusan politik secara pasif (Pureklolon, 2021).

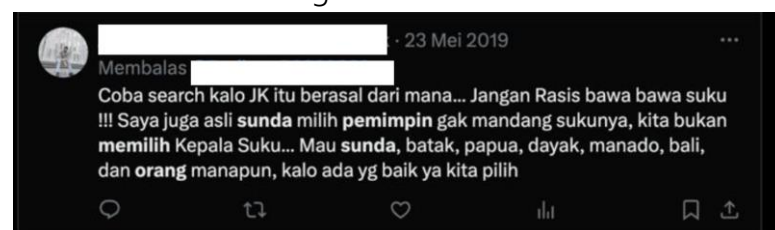
Berdasarkan hasil etnografi, ditemukan bahwa Etnis Makassar tergolong ke dalam budaya politik partisipan dan Etnis Sunda tergolong ke dalam budaya politik kaula. Hal ini dibuktikan oleh hasil etnografi melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil kuesioner, responden yang termasuk Etnis Makassar tidak hanya menilai setiap program calon pemimpin sebelum memutuskan untuk memilih dan merekomendasikan

pilihan calon pemimpin kepada orang lain tetapi juga turut berpartisipasi aktif dalam dialog terbuka atau pertemuan kampanye politik. Mayoritas dari responden juga menyatakan bahwa mereka berpartisipasi besar dalam kontestasi politik. Di lain sisi, responden yang tergolong Etnis Sunda tidak banyak yang merekomendasikan calon pilihan pemimpinnya kepada orang lain dan tidak pernah berpartisipasi dalam kampanye politik. Hasil yang kami dapatkan dari wawancara mendalam pun tidak jauh berbeda dengan hasil yang kami dapatkan dari kuesioner. Informan dengan Etnis Makassar memang lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kampanye politik dan merekomendasikan calon pemimpin pilihannya kepada orang lain dan hal yang berkebalikan terjadi kepada informan dengan Etnis Sunda.

Temuan kami tidak selaras dengan penelitian Haddad (2017) yang menyatakan Etnis Sunda cenderung memilih pemimpin yang bersesuaian dengan etnisitas dan budaya mereka. Namun, penelitian kami selaras dengan Herdiansah dan Albanjari (2023) yang menyatakan etnis Sunda lebih memilih pemimpin berdasarkan nilai ideal kepemimpinan Sunda seperti kecerdasan, karena etnis Sunda melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dan program yang ditawarkan yang bisa dilihat dari adanya kampanye yang dilakukan jelang pemilu. Hal ini dikarenakan Etnis Sunda memiliki orientasi damai dan pada dasarnya tidak terlalu memberikan aksi terkait partisipasi politik dalam pemilihan pemimpin sehingga mendorong budaya politiknya ke arah parokial.



Gambar 3. Netnografi Preferensi Pemilih Sunda



Gambar 4. Netnografi Preferensi Pemilih Sunda

Sesuai dengan penelitian Herdiansah dan Albanjari (2023) yang menyatakan bahwa etnis Sunda memilih pemimpin berdasarkan nilai ideal kepemimpinan. Data yang kami temukan dari platform sosial media X menunjukkan bahwa pemilih etnis Sunda cenderung memilih pemimpin berdasarkan hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh latar belakang calon pemimpin. Menurut @dipolbek di akun sosial media X-nya, dirinya sebagai pemilih Sunda

akan memilih orang yang baik untuk menjadi pemimpin. Tambahnya, adalah rasis apabila memilih pemimpin berdasarkan latar belakang terutama suku, karena pemimpin yang akan dipilih bukan dipilih untuk menjadi kepala suku.



Gambar 5. Netnografi Preferensi Pemilih Sunda

Menelisi penelitian di Etnis Makassar, menurut (Sjaf, 2017) Etnis Makassar memiliki budaya politik etnik yang kuat, di mana semangat etnisitas menjadi faktor utama dalam mendukung calon pemimpin mereka. Di sisi lain juga, Lapungge (2023) menyatakan Etnis Makassar juga cenderung menunjukkan karakter yang suka berperang, berani, dan suka merantau yang membuat mereka lebih berani untuk melakukan ekspansi di bidang politik yang tercermin dalam ekspansi karier politik mereka yang luas, seperti yang dilakukan oleh Jusuf Kalla, seorang pemimpin nasional yang berasal dari suku Bugis-Makassar. Oleh karena itu, budaya politik Etnis Makassar sudah cenderung ke arah partisipan. Hal ini didukung oleh hasil etnografi pada platform media sosial X, menyebutkan bahwa jika ada orang Makassar yang dapat menjadi pemimpin, tidak perlu untuk memilih pemimpin pada daerah lain, dalam konteks ini adalah memilih orang Gorontalo.



Gambar 6. Netnografi Preferensi Pemilih Makassar

Dampak Orientasi dan Budaya Politik Masyarakat Sunda dan Makassar dalam Pengambilan Keputusan Politik

Orientasi dan budaya politik yang pasif dan kurangnya minat emosional pada masyarakat etnis Sunda dapat menghasilkan tingkat partisipasi politik yang rendah. Meskipun orang Sunda sering dianggap memiliki budaya politik pasif, hal itu tidak berarti mereka benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam politik. Fakta bahwa mereka kurang terwakili secara nasional memperkuat kesan tentang kecenderungan politik yang lebih pasif di kalangan orang Sunda (Herdiansah dan Al-Banjari, 2023). Artinya, mereka cenderung tidak aktif dalam beberapa kegiatan politik yang lain, seperti kampanye sosial, diskusi politik atau bahkan pemilihan umum. Dampaknya, representasi mereka dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi terbatas, karena kurangnya kontribusi aktif dari masyarakat Sunda. Akibatnya, kepentingan dan aspirasi mereka mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup dari para pemimpin atau pembuat kebijakan. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka untuk memengaruhi perubahan yang diinginkan dalam masyarakat, karena mereka memiliki sedikit peran dalam menentukan arah politik dan kebijakan yang diterapkan.

Orientasi dan budaya politik yang lebih aktif di kalangan Etnis Makassar tentu memberikan dampak yang baik bagi mereka. Dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi melalui kehadiran mereka pada dialog terbuka dan kampanye politik, mereka berkesempatan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriterianya, aspirasinya didengar, dan mendapat perhatian lebih dari calon pemimpin. Berdasarkan hal ini, maka pengambilan keputusan politik bisa menjadi lebih mudah bagi Etnis Makassar. Hal ini, selaras dengan penelitian Faisal (2020) yang mengatakan bahwa pada dasarnya secara budaya, masyarakat Makassar suka musyawarah (*tudung sipulung* atau *tudung assipettangngareng*), maka dalam pengambilan keputusan politik mereka menjunjung tinggi hasil kesepakatan bersama pilihan rakyat. Karena disebutkan dalam lontara' Bugis Makassar bahwa keputusan tertinggi suatu kekuasaan berada pada kehendak rakyat (di tangan rakyat). Dengan kata lain, kehendak rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi dalam suatu tata urutan hukum adat.

Relevansi Perbedaan Orientasi dan Politik Budaya Etnis Sunda dan Makassar bagi Stabilitas Politik dan Pembangunan di Indonesia.

Secara keseluruhan, perbedaan orientasi dan politik budaya etnis Sunda dan Makassar memiliki dampak terhadap stabilitas politik dan pembangunan di Indonesia. Kedua etnis ini memiliki budaya politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan sistem politik dan juga keputusan politik yang diambil. Dalam beberapa kasus, perbedaan budaya politik ini dapat membantu memperkuat stabilitas politik di tingkat lokal dan juga mempengaruhi keputusan politik yang diambil. Namun, dalam beberapa kasus lainnya, kurangnya representasi politik dari etnis Sunda di tingkat nasional dapat mempengaruhi keputusan politik yang diambil dan juga stabilitas politik di tingkat nasional.

Pada keterlibatan dalam politik, etnis Sunda cenderung memiliki sikap yang lebih pasif dan lebih mengutamakan kerja sama, sedangkan etnis Makassar memiliki budaya politik yang lebih dinamis dan lebih fokus pada identitas etnis. Hal ini konsisten oleh pertanyaan Lapungge (2023) bahwa etnis atau keluarga politik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam dalam urusan politik dapat memberikan stabilitas dan konsistensi dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan ini dapat berdampak pada tingkat partisipasi politik dan keputusan politik yang diambil. Etnis Sunda lebih cenderung untuk terlibat dalam politik secara pasif (Herdiansah dan Albanjari, 2023). Etnis Sunda, mengikuti keputusan pemimpin lain, sementara etnis Makassar lebih aktif, mengorganisir demonstrasi atau kampanye politik.

Dalam memilih kandidat politik, budaya politik yang berbeda antara etnis Sunda dan Makassar dapat berdampak pada preferensi mereka dalam memilih kandidat politik. Etnis Sunda cenderung lebih memilih kandidat yang mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang ideal, seperti kecerdasan, keramahan, kesopanan, dan kewibawaan. Di sisi lain, etnis Makassar cenderung lebih memilih kandidat yang mewakili nilai-nilai budaya mereka sendiri. Hal ini terlihat pada

Dari orientasi dan budaya politiknya, etnis Makassar lebih mudah dalam mengekspansi politik. Meskipun dari sudut pandang antropologi, munculnya pemimpin nasional dari etnis non-Jawa sering dianggap sulit (Mathar, 2022), Etnis Makassar telah berhasil membuktikan bahwa mereka mampu mengembangkan karir politik mereka hingga ke tingkat nasional. Salah satu buktinya adalah presiden ketiga Indonesia yaitu BJ Habibie yang berhasil menjadi presiden pertama berasal dari Sulawesi Selatan. Selain itu, ada Jusuf Kalla yang telah berhasil menjadi pemimpin nasional yaitu Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti empirik bahwa Makassar telah mengekspansi politik ke wilayah yang lebih luas. Mereka

memiliki tradisi berdialog yang unik dan kaya akan makna budaya, serta memiliki semangat memimpin yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Budaya politik ini dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sistem politik dan mempengaruhi keputusan politik yang diambil. Dalam beberapa kasus, budaya politik ini dapat membantu memantapkan stabilitas politik dan mempengaruhi keputusan politik yang diambil.

SIMPULAN

Kesimpulan dari perbandingan orientasi dan budaya politik antara etnis Sunda dan etnis Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Terlihat perbedaan pandangan dan partisipasi politik, serta preferensi pemimpin. Etnis Sunda cenderung menunjukkan orientasi politik yang pasif, dengan penekanan pada kerjasama dan kerukunan. Di sisi lain, etnis Makassar menampilkan budaya politik yang dinamis, fokus pada identitas etnis dan partisipasi politik aktif.
- b. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi keterlibatan politik, tetapi juga preferensi pemimpin. Etnis Sunda cenderung memilih kandidat yang mencerminkan nilai kepemimpinan Sunda, sementara etnis Makassar lebih memilih kandidat yang mewakili budaya mereka.
- c. Dari perspektif pembangunan politik, perbedaan ini memiliki implikasi penting. Orientasi politik dan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi stabilitas politik di tingkat lokal dan nasional, serta proses pengambilan keputusan politik. Memahami lebih dalam perbedaan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mempromosikan stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Ridha, M., & Mustofa, M. U. 2017. Pemilu dan keniscayaan politik identitas etnis di Indonesia: Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 269–284. ISSN 2443-2539.
- Anwar, H. 2016. Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di SMK Negeri 1 Pontianak. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(1).
- Agustianty, E. F. 2021. Multikulturalisme di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tejgv>
- Asgar, S. 2023. Partisipasi politik masyarakat pada pemilu dan pilkada sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2802>
- Badan Pusat Statistik. 2010. Mengulik Data Suku di Indonesia. Diakses dari Copyright @ Ubaidah Abdurrahman Syamsari, Faisal, Marchyananda Winata, Anisa Nur Afifah, Habibah Assa'addah, Hana Indriana, Rizki Aditya Putra

- <https://www.bps.go.id/id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Fadli, M., Bailusy, M., Nas, J., & Zulfikar, A. 2018. Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. *ARISTO*, 6(2), 301–328. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Faisal, A. 2020. Refleksi kritis budaya politik kontemporer Bugis Makassar: Dari ruang publik kultural ke ruang publik politis. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 4(2), 71–84. ISSN 2590-4213.
- Fauzi, A. M. 2019. Perilaku pemilih menjelang pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.918>
- Haddad, R. S. M., & Hijran, M. (2017). Model kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik. *Prosiding Konferenai Nasional Kewarganegaraan III*.
- Hamdani, R. 2022. Antara etnosentrisme dan demokrasi: Konflik etnis Dayak-Madura. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 100–108.
- Hiranatasya, H. 2024. Analisis partisipasi generasi milenial dalam budaya politik Kota Bandung. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 12–18. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2061>.
- Herdiansah, A. G., Al-Banjari, H. M., & Politika: *Jurnal Ilmu Politik*. 2023. Refleksi budaya politik dan perilaku memilih suku Sunda. Volume 14, No. 1, 46–87. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.48-67>.
- Irliandi, I. A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. 2023. Pengaruh tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 333–339. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.172>.
- Lapungge, M. T., Arsi, A., & Junaeda, S. 2023. Antara keturunan dan kepemimpinan: Menilik dinasti politik Kota Makassar melalui lensa antropologi politik dalam konteks calon pemimpin daerah. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 61–69. <https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i2.411>
- Mansyur, I. 2020. Rasionalitas orientasi politik masyarakat nelayan Kabupaten Majene pada pemilihan umum legislatif.
- Mathar, Q. M. (2022, 17 November). Akademisi: Non-Jawa sulit jadi pemimpin Indonesia, tapi semua warga negara berhak jadi presiden. *Tribunnews*. <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/17/akademisi-sebut-tokoh-non-jawa-akan-sulit-jadi-pemimpin-indonesia>.
- Mauluddin, A. 2023. Perilaku pemilih Kota Bandung: Relasi elite dan masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 30–33.

- Piswatama, D., & Ivanna, J. 2023. Implementasi Kearifan Lokal Sunda Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 232–241. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.699>
- Pratama, D., Widodo, T., & Maulia, S. T. 2023. Penggunaan media digital dan partisipasi politik milenial. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.280>.
- Pureklolon, Dr. T. T. 2021. Eksistensi budaya politik di Indonesia: Sebuah kajian. *JC*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.147>
- Sumartono. 2018. Budaya politik dalam masyarakat pragmatis. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 2(1), 20–26. ISSN 2580-8338.
- Sumiaty, N. 2021. Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 56–67.
- Supriatin, A., & Nasution, A. R. 2017. Implementasi pendidikan multikultural dalam praktik pendidikan di Indonesia. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3(1), 1–13.
- Sjaf, S. 2017. Canalization of ethnic politics in Makassar. *Sodality: Journal Sosiologi Pedesaan*, 41(1), 92–97. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17968>
- Tradisi rantau masyarakat Bugis Makassar. (2015, Juni). Kompas. Diakses dari https://www.kompasiana.com/muhlis_lamuru/55001b65a33311a87250fd3a/tradisi-rantau-masyarakat-bugis-makassar.
- Umsu. 2023. Budaya Politik di Indonesia. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/>.
- Wadu, L. B. 2016. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan bidang kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.21009/jimnd.v15i2.8814>
- Yunita, R. P., & Stanislaus, S. 2014. Orientasi politik pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 3(1), 69–76. ISSN 2552-6838.